

PEREMPUAN TANGGUH, AGEN PERUBAHAN: PERAN STRATEGIS DI BPBD JAWA TIMUR

Aulia Midya Priandini¹, Dwi Setianingsih²

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

e-mail: auliapriandini614@gmail.com

Diterima: 17/01/2026; Direvisi: 26/01/2026; Diterbitkan: 30/01/2026

ABSTRAK

Isu kesetaraan gender dalam kelembagaan penanggulangan bencana masih menjadi tantangan, meskipun peran perempuan mulai diakui dalam respons darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis serta hambatan yang dihadapi oleh pegawai perempuan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, informan dalam penelitian ini terdiri atas pegawai perempuan yang terlibat langsung di lapangan serta pejabat kepegawaian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dilibatkan secara aktif dalam seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Kontribusi mereka mencakup perumusan kebijakan, edukasi masyarakat, koordinasi logistik, dukungan psikososial, serta rekonstruksi sosial. Namun, terdapat berbagai tantangan yang mereka hadapi, seperti kendala biologis, stereotip budaya yang meremehkan kapasitas perempuan, serta beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Meskipun demikian, pegawai perempuan di BPBD Jatim menunjukkan ketangguhan dan kapasitas kepemimpinan, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan kerja dan masyarakat. Keterlibatan mereka meningkatkan inklusivitas dan efektivitas program kebencanaan, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Penelitian ini menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam tata kelola bencana serta perlunya dukungan kelembagaan melalui kebijakan yang sensitif gender dan pembagian tugas yang adil.

Kata Kunci: *Perempuan, Kesetaraan Gender, Penanggulangan Bencana*

ABSTRACT

The issue of gender equality in disaster management institutions remains a challenge, although the role of women is beginning to be recognized in emergency response. This study aims to examine the strategic roles and obstacles faced by female employees at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of East Java Province. Using a descriptive qualitative approach, informants in this study consisted of female employees directly involved in the field as well as staffing officials. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, direct observation, and documentation analysis. The results showed that women are actively involved in all phases of disaster management, starting from the pre-disaster stage, emergency response, to post-disaster recovery. Their contributions include policy formulation, community education, logistics coordination, psychosocial support, and social reconstruction. However, they face challenges such as biological constraints, cultural stereotypes that underestimate women's capacity, and the double burden of work and domestic responsibilities. Nevertheless, female employees in BPBD Jatim demonstrate resilience and leadership capacity, and are able

to become agents of change in the work environment and community. Their involvement increases the inclusiveness and effectiveness of disaster programs, especially in reaching vulnerable groups such as children, the elderly, and pregnant women. This research emphasizes the importance of gender mainstreaming in disaster governance as well as the need for institutional support through gender-sensitive policies and equitable division of tasks.

Keywords: *Women, Gender Equality, Disaster Management*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, termasuk di Jawa Timur yang secara berkala mengalami gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan potensi tsunami. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra serta pada pertemuan beberapa lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina, yang menyebabkan tingginya aktivitas seismik dan vulkanik (Irsyam et al., 2020). Selain itu, Indonesia memiliki jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Maluku sehingga meningkatkan potensi bencana geologi secara berkelanjutan (Brown et al., 2017). Secara normatif, Undang-Undang 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat akibat faktor alam, nonalam, maupun ulah manusia, yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga suatu peristiwa alam baru dapat dihitung sebagai bencana apabila menimbulkan dampak nyata terhadap kehidupan manusia dan sistem sosial-ekonomi masyarakat (Lestari & Nugroho, 2019). Dalam konteks penanggulangan bencana, fase pascabencana merupakan tahap krusial karena fokus pada pemulihan sosial-ekonomi, rehabilitasi infrastruktur, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat guna mendukung kerinduan pembangunan di wilayah terdampak (Bank Dunia, 2018).

Berbagai peristiwa bencana alam menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun nonmateriil, yang meliputi kerusakan fisik, kerugian ekonomi, gangguan sosial, kehilangan mata pencaharian, serta dampak psikologis yang meningkatkan kerentanan kelompok masyarakat tertentu (Badan Pusat Statistik, 2022). Oleh karena itu, penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan berbagai aktor secara kolaboratif dan berkelanjutan, dengan pemerintah sebagai aktor utama dalam edukasi kebencanaan, mitigasi risiko, tanggap darurat, dan pemulihan wilayah terdampak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan ditegaskan oleh Kapucu (2018). Penanggulangan bencana merupakan upaya sistematis dan terintegrasi yang mencakup tiga tahap utama, yaitu prabencana melalui mitigasi dan pengurangan risiko, tanggap darurat melalui penyelamatan dan penyediaan kebutuhan dasar, serta pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan layanan publik, kelembagaan, serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam praktik penanggulangan bencana, aparat Badan Penanggulangan Bencana dituntut selalu berada dalam kondisi siaga tanpa membedakan jenis kelamin. Namun keterlibatan perempuan dalam pengoperasian lapangan masih cenderung terbatas dan sering dipersepsikan pada peran administratif dan pendukung, sementara peran strategis dan operasional didominasi oleh laki-laki (UN Women, 2021). Kondisi ini mencerminkan kuatnya konstruksi sosial yang memosisikan perempuan dalam peran subordinat, sehingga upaya mewujudkan kesetaraan gender menjadi penting dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pemahaman kesetaraan gender perlu diawali dengan perbedaan antara konsep seks sebagai perbedaan biologi dan gender sebagai konstruksi sosial-budaya yang membentuk peran,

nilai, serta ekspektasi dalam masyarakat (Tannenbaum et al., 2019). Ketimpangan gender dalam penanggulangan bencana terbukti berdampak pada rendahnya perlindungan kelompok rentan dan kurang optimalnya efektivitas respons bencana, karena relasi kekuasaan berdasarkan gender memengaruhi akses terhadap sumber daya dan kapasitas respons darurat (Gaillard et al., 2017).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat provinsi, dengan fungsi strategis yang meliputi penyusunan pedoman, pemetaan wilayah rawan bencana, pengendalian, serta pelaporan dan evaluasi. Dalam situasi darurat, BPBD bekerja sama dengan BNPB dan berbagai pemangku kepentingan, dengan jumlah aparatur tercatat sebanyak 266 orang (BPBD Jawa Timur, 2024). Dalam konteks kebencanaan, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok paling rentan terdampak, terutama dalam situasi pengungsian yang meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, keterbatasan layanan kesehatan reproduksi, serta minimalnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Oleh karena itu, pengarusutamaan perspektif gender dalam penanggulangan bencana menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keadilan dan efektivitas kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, partisipasi pegawai perempuan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan bencana menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pegawai perempuan BPBD Jawa Timur dalam penanganan bencana alam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan penanggulangan bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam keterlibatan pegawai perempuan dalam penanggulangan bencana berdasarkan kondisi empiris di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada peran dan kontribusi pegawai perempuan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur pada setiap tahapan penanggulangan bencana, meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penelitian dilaksanakan di lingkungan BPBD Provinsi Jawa Timur. Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas kerja pegawai perempuan, wawancara mendalam dengan informan terpilih, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan, arsip institusi, foto, dan dokumen pendukung lainnya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.

Subjek penelitian adalah pegawai perempuan BPBD Provinsi Jawa Timur yang terlibat langsung dalam kegiatan penanggulangan bencana. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) pegawai perempuan yang memiliki pengalaman langsung dalam penanggulangan bencana, (2) terlibat aktif pada salah satu atau beberapa tahapan penanggulangan bencana, dan (3) memiliki pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data. Analisis meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan untuk menyusun makna dan pola keterlibatan perempuan dalam penanggulangan bencana. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Perempuan dalam Tiga Fase Bencana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, keterlibatan pegawai perempuan dalam penanggulangan bencana di BPBD Provinsi Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang positif dan berlangsung pada seluruh fase penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pegawai perempuan tidak hanya terlibat dalam kegiatan pendukung, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai tugas strategis yang berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemulihan pascabencana. Keterlibatan ini terlihat dari partisipasi perempuan dalam kegiatan sosialisasi kebencanaan, pengelolaan logistik, pendampingan pengungsi, hingga pemulihan psikososial masyarakat terdampak. Temuan ini menunjukkan bahwa peran pegawai perempuan di BPBD Provinsi Jawa Timur semakin diakui dan dioptimalkan dalam sistem penanggulangan bencana, baik pada tingkat kelembagaan maupun di lapangan.

Pada fase pra bencana, pegawai perempuan terlibat dalam kegiatan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi mitigasi bencana. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pegawai perempuan tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga berperan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa pelibatan pegawai perempuan pada tahap pra bencana bertujuan untuk memastikan kebutuhan kelompok berisiko tetap menjadi perhatian dalam perencanaan kebencanaan. Keterlibatan pegawai perempuan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi kebencanaan pada fase pra bencana dapat dilihat melalui aktivitas kunjungan dan pendampingan di Taman Pendidikan Bencana, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kunjungan Di Taman Pendidikan Bencana

Pada fase tanggap darurat, pegawai perempuan berperan aktif dalam beberapa kluster utama, khususnya kluster logistik, pengungsian, dan kesehatan. Dalam kluster logistik, pegawai perempuan terlibat dalam pencatatan, pengelolaan stok, pengemasan, hingga pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak. Sementara itu, dalam pengelolaan pengungsian, pegawai perempuan menangani administrasi pengungsi serta melakukan pendampingan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa keberadaan pegawai perempuan berkontribusi dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan stabilitas psikologis pengungsi di lokasi pengungsian. Partisipasi aktif pegawai perempuan dalam fase tanggap darurat juga tercermin melalui

keterlibatan mereka dalam kegiatan peningkatan kapasitas teknis dan medis, seperti pelatihan penyelamatan dan penanganan korban, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Vertikal Rescue Dan Medical First Responder

Pada fase pascabencana, pegawai perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan pemulihan psikososial masyarakat terdampak bencana. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi konseling ringan, pendampingan psikologis, kegiatan bermain bagi anak-anak, serta forum diskusi bagi perempuan korban bencana. Selain itu, pegawai perempuan turut berperan dalam pembentukan forum warga sebagai upaya untuk memulihkan kembali komunikasi dan kebersamaan komunitas pascabencana. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai perempuan di BPBD Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjalankan tugas teknis di lapangan, tetapi juga berperan sebagai penggerak dalam proses pemulihan sosial dan psikologis masyarakat terdampak bencana. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, BPBD Provinsi Jawa Timur juga memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui dukungan sarana dan prasarana kepada agen bencana, yang ditunjukkan melalui kegiatan pembagian alat pelindung diri sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pembagian Apd Personal Kepada Agen Bencana Di BPBD Malang Raya

2. Hambatan yang Dihadapi Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai perempuan di BPBD Provinsi Jawa Timur masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Hambatan tersebut mencakup aspek sosial dan budaya, biologis, serta peran ganda yang dijalani oleh perempuan. Secara sosial dan budaya, masih terdapat pandangan yang meragukan kemampuan perempuan dalam menjalankan tugas lapangan, terutama di wilayah terdampak bencana. Perempuan sering kali diposisikan sebagai korban, bukan sebagai aktor penanggulangan

bencana, sehingga tingkat kepercayaan terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan di lapangan masih terbatas.

Selain hambatan sosial dan budaya, pegawai perempuan juga menghadapi hambatan biologis berupa siklus menstruasi, terutama ketika bertugas pada fase tanggap darurat. Keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, ketersediaan air bersih, serta produk kebersihan menjadi kendala yang memengaruhi mobilitas dan performa kerja pegawai perempuan di lapangan. Hambatan lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah beban ganda yang dialami oleh pegawai perempuan, yaitu keharusan membagi waktu dan energi antara tanggung jawab profesional dan kewajiban domestik. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesiapan fisik dan mental perempuan dalam menjalankan tugas kebencanaan secara optimal. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sejumlah pegawai perempuan mampu mengatasi berbagai keterbatasan tersebut dan tetap berperan aktif sebagai penghubung antara BPBD dan masyarakat terdampak bencana.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam penanggulangan bencana di BPBD Provinsi Jawa Timur mencerminkan pendekatan yang semakin berperspektif gender. Hal ini sejalan dengan Alam dan Rahman (2017) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki kerentanan sekaligus kapasitas strategi dalam seluruh tahapan siklus bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Keterlibatan perempuan pada fase pra-bencana memperkuat pendekatan pengurangan risiko bencana yang partisipatif dan berbasis komunitas. Perspektif perempuan yang dekat dengan dinamika keluarga dan komunitas memungkinkan kebijakan mitigasi menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan bencana, sebagaimana ditegaskan oleh Rahman dan Salehin (2018).

Pada fase tanggap darurat, peran perempuan dalam kluster logistik dan pengungsian memperkuat pandangan bahwa kemampuan perempuan dalam ketelitian, empati, serta pengelolaan kebutuhan dasar menjadi faktor penting dalam efektivitas penanganan bencana. Keterlibatan perempuan dalam kluster-kluster penanggulangan bencana menunjukkan bahwa stereotip gender yang meremehkan kapasitas perempuan dalam situasi krisis tidak sepenuhnya terbukti, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian Handayani (2019). Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam pemulihan psikososial pascabencana menegaskan bahwa pemulihan bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis. Pendampingan oleh sesama perempuan mendorong keterbukaan korban, khususnya perempuan dan anak-anak, sehingga mempercepat proses pemulihan trauma. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan modal sosial masyarakat pascabencana.

Hambatan yang dihadapi pegawai perempuan dalam penanggulangan bencana menunjukkan bahwa isu gender masih menjadi tantangan struktural dan kultural. Kerentanan perempuan dalam situasi bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik, termasuk

dalam aktivitas penanggulangan bencana. Pandangan yang memposisikan perempuan semata-mata sebagai korban berpotensi menghambat optimalisasi kapasitas perempuan sebagai aktor kebencanaan. Hambatan sosial, budaya, dan kelembagaan masih menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana. Hambatan biologis, seperti menstruasi, menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana masih kurang sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan. Ketiadaan fasilitas sanitasi yang memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta kinerja pegawai perempuan di lapangan. Hal ini menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan operasional penanggulangan bencana.

Beban ganda yang dialami perempuan juga mencerminkan ketimpangan peran gender yang masih kuat. Oleh karena itu, penguatan kebijakan kelembagaan yang mendukung kesetaraan gender seperti pelatihan berbasis gender, perlindungan kerja di lapangan, serta pembagian tugas yang adil menjadi langkah-langkah strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara berkelanjutan dalam pengurangan risiko bencana.

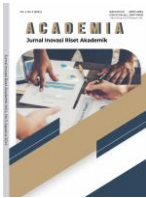
KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pegawai perempuan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang penting dan nyata dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Perempuan tidak hanya terlibat dalam fungsi administratif, tetapi juga berperan strategis dalam kegiatan sosialisasi kebencanaan, pengelolaan logistik, pendampingan pengungsi, serta pemulihan psikososial masyarakat terdampak. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kontribusi perempuan semakin diakui dalam sistem penanggulangan bencana, sekaligus menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif gender untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala yang masih dihadapi pegawai perempuan, baik yang bersifat sosial-budaya, biologis, maupun struktural, seperti stereotip gender, keterbatasan fasilitas sanitasi yang sensitif gender, serta beban ganda antara tanggung jawab profesional dan domestik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan tindakan penanggulangan bencana melalui peningkatan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, penyediaan fasilitas dan perlindungan kerja yang memadai, serta pengembangan kapasitas berbasis gender. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi perempuan secara berkelanjutan dan mendorong terwujudnya penanggulangan bencana yang adil, inklusif, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, K., & Rahman, MH (2017). Perempuan dalam pengurangan risiko bencana: Studi kasus dari Bangladesh. *Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana*, 23, 82–92. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.03.002>
- Aldrich, DP, & Meyer, MA (2015). Modal sosial dan ketahanan komunitas. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. (2024). *Profil dan data*



- kepegawaian BPBD Provinsi Jawa Timur. <https://bpbd.jatimprov.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik bencana alam. BPS. <https://www.bps.go.id/subject/156/bencana-alam.html>
- Brown, SK, Jenkins, SF, Sparks, RSJ, Odbert, H., & Auker, MR (2017). Basis data korban jiwa akibat gunung berapi: Analisis ancaman gunung berapi dengan penekanan pada Indonesia. *Jurnal Vulkanologi Terapan*, 6 (1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s13617-017-0067-4>
- Gaillard, JC, Sanz, K., Balgos, BC, Dalisay, SNM, Gorman-Murray, A., Smith, F., & Toelupe, V. (2017). Melampaui laki-laki dan perempuan: Perspektif kritis tentang gender dan bencana. *Geoforum*, 87 , 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.09.018>
- Handayani, S. (2019). Peran perempuan dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(2), 143–156. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/32745>
- Irsyam, M., Widiyantoro, S., Natawidjaja, DH, Meilano, I., Rudyanto, A., Hidayati, S., Triyoso, W., Hanifa, NR, Djarwadi, D., & Faizal, L. (2020). Pengembangan peta bahaya gempa nasional Indonesia tahun 2017. *Spektrum Gempa*, 36 (1_suppl), 112–136. <https://doi.org/10.1177/8755293020951206>
- Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana. (2017). *Kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015–2030*. UNDRR. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
- Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana. (2022). *Laporan penilaian global tentang pengurangan risiko bencana*. UNDRR. <https://www.undrr.org/gar>
- Kapucu, N. (2018). Tata kelola kolaboratif dalam manajemen bencana. *Public Administration Review*, 78 (2), 234–245. <https://doi.org/10.1111/puar.12822>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Perempuan dalam situasi bencana. KPPPA. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Lestari, E., & Nugroho, SP (2019). Konsep risiko bencana dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 10(2), 65–76. <https://jurnal.bnpb.go.id/index.php/jpb/article/view/347>
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2022). *Data gunung api aktif Indonesia*. PVMBG. <https://vsi.esdm.go.id>
- Rahman, MA, & Salehin, M. (2018). Pengurangan risiko bencana melalui partisipasi masyarakat: Peran perempuan. *Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana*, 28, 823–832. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.02.018>
- Rushton, A., & Gray, L. (2020). Gender dan aksi kemanusiaan: Kemajuan dan kesenjangan. *Bencana* , 44(2), 235–256. <https://doi.org/10.1111/disa.12382>
- Tannenbaum, C., Ellis, RP, Eyssel, F., Zou, J., & Schiebinger, L. (2019). Analisis seks dan gender meningkatkan sains dan teknik. *Nature*, 575 (7781), 137–146. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1657-6>
- UN Women. (2021). Gender dan pengurangan risiko bencana. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action/disaster-risk-reduction>
- World Bank. (2018). *Recovery and reconstruction after disaster: A guide for sustainable development*. World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29895>